

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tidak ada kawasan dalam keadaan kosong tanpa penghuni (*terra incognita*), artinya daerah-daerah telah ditempati penduduk lokal dengan kekuatan ekonomi politik tradisional.¹ Salah satunya Blitar yang tergolong kota pedalaman di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Melalui *Nederlansche Gouvernment*² tahun 1830, Blitar dimasukkan menjadi bagian dari Karesidenan Kediri dengan status *Regentschap*. Luas wilayahnya 16,1 km² dan dibagi menjadi lima distrik yaitu, Blitar, Srengat, Wlingi, Lodoyo, dan Gandoesari.³ Blitar dipimpin Bupati (*regent*) dan terdapat jabatan asisten residen bertugas sebagai pengawas dan *controlleur*⁴ untuk melayani penduduk Eropa.

Sebelum penguasaan kolonial, masyarakat Blitar bersifat homogen, bercorak budaya Mataraman, cenderung feodal dan memandang posisi tertinggi

¹Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85

² Wilayah yang berada dalam pengawasan dan penguasaan *Nederlansche Gouvernment* telah diakui oleh pemerintah pusat, yang artinya pihak kesultanan dan kasunanan tidak lagi menjadi sentral pemerintahan daerah di berbagai wilayah kabupaten yang sebelumnya telah dikuasainya. Secara tidak langsung wilayah keswatantraan daerah dihapuskan dan menjadi bagian dari pemerintahan pusat Hindia Belanda.

³ J. Paulus, *Encyclopedie Van Nederlandschi-Indie*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1917), hlm. 315

⁴ Jabatan fungsional di masa pemerintahan kolonial Belanda yang dijabat oleh golongan kulit putih. Tugasnya sebagai koordinator pengawasan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat ke tingkat daerah. Penempatannya di wilayah kawedanan, sedangkan di tingkat kecamatan diangkat asisten kontrolir.

pemerintahan terpusat di keraton.⁵ Awalnya komposisi masyarakat Blitar terdiri dari orang-orang Bumiputera asli. Keberadaan etnis Tionghoa di Blitar diperkirakan sejak abad ke-17, mengingat di tahun 1829 didirikan Klenteng Po Aan Kiong.⁶ Pendirian klenteng sebagai bentuk eksistensi golongan Tionghoa yang telah menetap lebih lama daripada kalangan Eropa ataupun Arab. Masyarakat Tionghoa yang ada di Blitar cenderung mengelompok di satu wilayah yang dekat dengan potensi perekonomian perdagangan.

Perpindahan penduduk terutama di kalangan Eropa semakin tinggi ketika kebijakan pintu terbuka (*opendeur politiek*) diberlakukan bersamaan dengan Undang-Undang Agraria yang ditetapkan tahun 1870. Selain itu faktor *migration circuit* tahap ketiga (1919-1940) mendorong bangsa Eropa semakin aktif berpindah tempat dan menempati kawasan baru tidak terkecuali di Blitar. Melalui kebijakan ini pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut adalah masuknya modal swasta perkebunan dan pabrik masuk ke Blitar sejak paruh kedua abad ke-19. Hal ini telah memberikan peluang lebih luas bagi para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Blitar. Usaha perkebunan mulai dibuka di Blitar dan mampu merekrut tenaga kerja dari berbagai kalangan termasuk orang Eropa. Pengusaha perkebunan datang ke Blitar tidak sendiri, mereka membawa serta keluarganya, bertempat tinggal, memiliki keturunan, dan membangun pemukiman yang memadai.

⁵ Hery Setiabudi, *Blitar Tempoe Doeloe*, (Blitar: Mekar Sari, 2019), hlm. 45

⁶ *Ibid.*

Kontak antara masyarakat asli dan Eropa mulai meningkat sejak penerapan politik etis 1901 melalui berbagai bidang salah satunya pendidikan. Di sisi lain mobilitas bangsa Eropa yang semakin tinggi menjadi salah satu faktor wilayah Blitar ditetapkan menjadi *Gemeente* pada tahun 1906. Blitar dirancang sebagai salah satu daerah yang diubah statusnya menjadi kota otonom (*Gemeente*) melalui *Staatsblad van Nederlandche Indie* Nomor 150 tertanggal 1 Maret 1906, dan baru diberlakukan mulai tanggal 1 April 1906.⁷ Hasil produksi sumber daya alam yang berkualitas ekspor menjadikan Blitar berkembang menjadi daerah penunjang mata rantai perekonomian dan industri di Surabaya di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pasca berhasil membentuk status *Gemeente* Blitar, pemerintah Belanda mengatur dengan cara-cara dan peraturan yang lebih komprehensif. Pemerintah mulai menyediakan fasilitas publik guna menunjang aktivitas masyarakat, seperti disediakan kantor pemerintahan baru, stasiun kereta api, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, penataan kompleks pemukiman, dan fasilitas umum lainnya. Status kota otonom mendorong Blitar menjadi daerah yang lebih modern dengan penataan dan perubahan di masyarakat yang terlihat signifikan. Kehadiran bangsa Eropa semakin memperlihatkan multikulturalisme dalam sistem sosial masyarakat Blitar. Pertambahan jumlah migran baik dari kalangan Bumiputera maupun Eropa membuat wilayah pemukiman penduduk di pusat kota menjadi padat dan meluas tidak lagi terbatas di sekitar daerah pemerintahan. Penduduk Eropa semakin banyak

⁷*Staatsblads van Nederlandsch-Indie* No.150, *Decentralisatie*, 1906

menempati kawasan pusat kota dan sebagian mengelompok di sekitar area perkebunan.

Orang-orang Eropa pendatang ini diantaranya para pegawai pemerintahan, militer, tenaga kesehatan, keluarga pengusaha perkebunan, hingga para pegawai industri yang membawa serta keluarganya untuk bertempat tinggal di Blitar. Hal ini menimbulkan persinggungan dalam aktivitas sehari-hari penduduk dan membuka peluang terjadinya pertemuan nilai-nilai sosial-budaya antara masyarakat lokal dan pendatang. Kehadiran pemerintah kolonial yang terwujud dalam status *gemeente* telah bertindak sebagai perangkat yang mampu melakukan intervensi dan mengendalikan kehidupan masyarakat Blitar terutama di lingkup perkotaan.

Persinggungan di ruang kehidupan sosial masyarakat Blitar tidak hanya antara kalangan Bumiputera dan Eropa, namun melibatkan unsur lain dari kalangan etnis Tionghoa dan sedikit kelompok masyarakat Arab.⁸ Interaksi yang terjalin antar kelompok masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya pemukiman-pemukiman mengelompok yang didiami oleh para pendatang. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk Blitar semakin bertambah dan terlihat lebih heterogen. Tercatat sejak pembentukan *gemeente* sampai tahun 1920-an jumlah penduduk Blitar mengalami peningkatan berkisar 19.700 jiwa dan di tahun 1930-an penduduk Blitar sebanyak 27.846 jiwa.⁹

⁸ Den B.I Mardiono Gudel, *Napak Tilas Jejak-Jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa*, (Blitar: Blitar heritage Society dan Bappeda Kota Blitar, 2014), hlm. 75

⁹ Nurhadi Sasmita, "Industrialisasi di *Gemeente* Blitar 1900-1942", *Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol.XVI No. 2*, hlm. 12

Keberadaan kelompok pendatang baik dari kalangan bangsa Eropa, Tionghoa dan keturunan Arab ke wilayah Blitar berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Hal tersebut berdampak pada proses interaksi yang terjalin antara penduduk asli dan pendatang dalam jangka waktu yang lama. Tentunya proses interaksi yang berjalan akan memberikan implikasi pada perubahan dan pengembangan terhadap nilai-nilai dan sistem sosial di Blitar.

Hubungan sosial antar penduduk di Blitar dipertegas ketika pemerintah *gemeente* membedakan penduduk asli maupun pendatang berdasarkan ras hingga profesi yang dijalani. Struktur masyarakat diciptakan berlapis-lapis seperti di kota kolonial, dengan ciri orang-orang Eropa berada di kelas sosial paling atas.¹⁰ Proses pembentukan stratifikasi dipengaruhi oleh faktor mata pencaharian, jenis pekerjaan hingga latar belakang keturunannya. Individu atau kelompok yang menempati kelas atas di Blitar tidak hanya golongan Eropa melainkan juga berasal dari keluarga bangsawan Bumiputera dan dari kalangan elite Tionghoa.¹¹ Mata pencaharian dari masing-masing golongan berbeda-beda. Orang Eropa lebih banyak berprofesi sebagai pengusaha, pemilik modal, dan menduduki jabatan di pemerintahan. Kalangan Tionghoa lebih banyak bekerja di sektor perdagangan baik sebagai pedagang maupun distributor besar. Bumiputera memiliki profesi yang lebih beragam dari mulai pejabat politik sampai profesi kelas bawah seperti pedagang, tukang becak, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

¹⁰ Pemerintah Kota Blitar, *Hari Jadi dan Bunga Rampai Sejarah Kota Blitar*, (Blitar: Bappeda dan Blitar Heritage Society, 2008), hlm. 104

¹¹ Pemerintah Kota Blitar, *op.cit*, hlm. 110

Bagi Bumiputera asli, tentunya terjadi proses penyesuaian diri untuk berinteraksi di dalam situasi dan kondisi pemerintahan kolonial. Terlebih ketika terbentuknya *gemeente* menjadikan Blitar memiliki dualisme kepemimpinan. Masyarakat Bumiputera harus beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, bagi yang memiliki kemampuan akan bertahan pada status sosialnya. Individu atau kelompok yang tidak beruntung dan tidak memiliki kekuatan di sektor tertentu akan tersingkirkan dari ruang sosial dan harus mengikuti bentuk perubahan yang ada.¹² Hal tersebut karena beberapa produk hukum dan infrastruktur fisik sebagian merepresentasikan kepentingan kelompok elite dan penguasa terutama warga Eropa.

Masa pemerintahan *gemeente* di Blitar yang berlangsung sejak awal hingga pertengahan abad ke-20 menjadi penting dalam sejarah sosial di Blitar. Seperti yang dipaparkan Kuntowijoyo, bahwa studi sosial di Indonesia banyak memperhatikan implikasi luas pada bentuk transformasi sosial dari masyarakat tradisional menuju modern namun tidak banyak yang memberikan tempat pada sejarahnya.¹³ Penelitian ini menekankan pada aspek kehidupan sosial masyarakat Blitar sebagai sasaran kebijakan penguasa pada tahun 1906 sampai 1942. Kehidupan sosial masyarakat yang dianalisis merujuk pada proses interaksi dan terbentuknya sistem stratifikasi di masyarakat. Penelitian ini bukan sebuah studi baru untuk wilayah Blitar sebagai daerah yang pernah dikuasai pemerintah Hindia

¹² W.F Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 44

¹³ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 6

Belanda. Namun dapat dikatakan sebagai kajian pertama terkait sejarah masyarakat Blitar dan kondisi sosialnya pada kurun waktu tahun 1906-1942.

1.2 Rumusan Masalah

Perhatian penelitian ini pada aspek stratifikasi masyarakat yang terbentuk setelah bangsa Eropa mendiami wilayah Blitar. Orang-orang Bumiputera, Eropa, Tionghoa dan sebagian kelompok penduduk Arab menjadi pendorong keberlangsungan kehidupan dan sistem sosial di Blitar. Terdapat dua rumusan masalah untuk kemudian dikembangkan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dua rumusan masalah tersebut diantaranya :

1. Bagaimana sistem stratifikasi di ruang sosial Blitar tahun 1906-1942 ?
2. Bagaimana proses interaksi antar kelompok masyarakat hingga memunculkan berbagai fasilitas dan produk sosial bagi masyarakat di Blitar tahun 1906-1942?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sejarah dan keadaan sosial masyarakat Blitar pada kurun waktu 1906 hingga 1942. Blitar salah satu *Affdeling* di Karesidenan Kediri, yang sebelumnya merupakan bagian dari daerah Monconegoro Wetan Kasultanan Surakarta. Penetapan sebagai daerah otonom (*gemeente*) pada tahun 1906 mengubah tata kelola kota dan kehidupan sosial masyarakat Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera di Blitar. Searah dengan proses yang terjadi, penelitian ini pun juga bertujuan untuk mendeskripsikan stratifikasi yang terbentuk di dalam masyarakat Blitar. Adapun tujuan selanjutnya untuk mendeskripsikan proses interaksi yang dialami penduduk

di Blitar secara keseluruhan. Secara umum penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khasanah kesejarahan Blitar dengan tema sejarah sosial.

Urgensi penulisan sejarah lokal dengan unsur tema sosial ini diharapkan berguna bagi perkembangan historiografi sejarah sosial dan sejarah lokal. Ditinjau dari segi historiografi, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terhadap penulisan sejarah sosial di Blitar. Selain itu mampu menambah wawasan tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Blitar sejak 1906 sampai 1942, terutama dampak ketika berada di bawah kepemimpinan pemerintah *gemeente*. Secara umum penelitian ini memberikan manfaat dalam kajian ilmu humaniora, terutama pada sejarah sosial di masyarakat Blitar. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan refleksi atas sejarah perkembangan masyarakat Blitar, agar kedepan dapat dijadikan cermin bagi pengelolaan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Sebuah penelitian sejarah harus dibatasi dengan batasan spasial dan batasan temporal agar historiografi sebagai hasil akhir dari riset sejarah menjadi diakronis. Dalam riset ini penulis menempatkan Blitar sebagai ruang lingkup spasial penelitian bukan tanpa sebab. Pengkajian sejarah lokal terkait kota kecil dan peranannya dalam narasi sejarah bangsa menjadi alasan utama, yang didukung oleh hasil catatan sumber baik primer maupun sekunder. Menurut catatan historiografi di abad ke-18 daerah Blitar termasuk ke dalam kekuasaan Keraton Kartasura tepatnya wilayah bagian monconegoro wetan, karena perjanjian Giyanti 1755 yang

membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Pemerintahan Hindia Belanda menjadikan Blitar sebagai daerah *Afdelling* dalam kelompok wilayah Karesidenan Kediri bersama daerah lain seperti Tulungagung dan Trenggalek.¹⁴

Blitar mendapat perhatian khusus dari pemerintah Hindia Belanda, karena memiliki iklim dan sumber daya alam yang memadai dan menjadi incaran bagi pengusaha swasta untuk menanamkan modal di bidang perkebunan. Blitar ditetapkan sebagai daerah otonom (*gemeente*) sehingga mengalami dualisme kepemimpinan. Daerah Blitar memiliki iklim dan sumber daya alam yang memadai dan menjadi incaran bagi pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya, terbukti dengan banyaknya perkebunan yang diusahakan.

Penetapan status *gemeente* pada Blitar menjadikan daerah ini memiliki dualisme kepemimpinan pemerintah yaitu, *regentschap* dipimpin oleh Bupati yang terlebih dulu berkuasa dan *gemeente* dijabat oleh *Burgemeester*. Batas wilayah *regentschap* di sebelah barat Toeloengagung, sebelah timur wilayah Malang, di utara berbatasan dengan Kediri dan deretan pegunungan di Malang, sedangkan wilayah selatan merupakan Samudera Hindia. Batas wilayah *gemeente* sebelah timur sejak tahun 1906 meliputi Gebangstraat - Oost Sanan Wetanstraat – West Sanan Wetanstraat yang merupakan jalan menuju ke Wlingi. Di barat berbatasan dengan Kali Lahar dan distrik Srengat, yang mana dari arah timur ke barat merupakan jalan menuju Kediri. Batas selatan berbatasan dengan Tloempo, Toeri dan Kademangan. Batas utara yaitu, Kedawung, Penataran, Nglegok,

¹⁴ Staatsblad Van Nederlandsche Indie Tahun 1844, no. 21

Karangredjo.¹⁵ Adapun dapat dikatakan batasan dalam pembahasan ini merujuk pada masyarakat di wilayah Blitar secara keseluruhan, meliputi masyarakat *regentshap* di lingkup pedesaan dan masyarakat di pusat kota *gemeente*.

Adapun batasan temporal pada penelitian, penulis menetapkan periode 1906 sampai 1942. Penulis menentukan tahun 1906 sebagai batas awal penelitian didasarkan atas penetapan Blitar sebagai kawasan kota otonom (*Gemeente*) yang tertulis pada *Staatblad van Nederlands Indie* Nomor 150 tertanggal 1 Maret 1906. Di tahun tersebut merupakan awal ditetapkannya pemerintah kolonial menguasai dan mengelola daerah Blitar dengan hadirnya pemerintahan Kotapraja. Hal tersebut pada akhirnya mendorong perubahan sistem di masyarakat Blitar secara luas karena adanya pengaturan-pengaturan baru terhadap penduduk.

Batasan akhir penelitian sampai pada tahun 1942 dimana pada periode ini dikeluarkan Osamu Seirei No.27 tentang Aturan Pemerintah Daerah sekitar bulan Agustus 1942, yang isinya menerangkan bahwa seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas *Shu* (Karesidenan) dan *Shi* (kotapraja), *Ken* (Kabupaten).¹⁶ Sehingga di tahun 1942 inilah terjadi perubahan status dari *Gemeente* menjadi *Blitar Shi* (*Buritaro Shi*), yang mana daerah Blitar masuk dalam *Shu* (Karesidenan) Kediri. Blitar juga termasuk wilayah yang diduduki pemerintahan Jepang, dipimpin oleh *Shicok* (Walikota) yang dijabat oleh elite Bumiputera.¹⁷ Perubahan status penguasaan dari Hindia-Belanda ke tangan

¹⁵ Arsip Nasional Indonesia, "Peta Jawa and Madura 1:50.000", *Blitar 1939*, from Army Map Service, Copied from a Dutch map date 1939, ID ANRI-KG-2-23-0543

¹⁶ Pemerintah Kota Blitar, *op.cit*, hlm. 154

¹⁷ Denik Kharisma Sari, "Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1945", *Skripsi*, (Jember: Universitas Negeri Jember, 2016), hlm. 9

Jepang, akhirnya memaksa bangsa Eropa secara perlahan harus meninggalkan Blitar dan menyisakan bangunan-bangunan dan pusat perkebunan yang telah dibangun oleh Hindia-Belanda dialihfungsikan oleh Jepang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mereview beberapa referensi dari buku, skripsi, dan jurnal ilmiah dari website dan perpustakaan digital beberapa universitas. Bahan-bahan tersebut menjadi rujukan bagi penulis untuk menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini. Referensi diambil dari pendekatan pustaka, mengenai sejarah perkotaan, sejarah Blitar, dan pustaka tentang perubahan sosial di masyarakat.

Terkait dengan tema sejarah kota dan perubahannya, pertama penulis menggunakan rujukan karya R. Reza Hudiyanto, *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa 1914-1950*. Buku yang merupakan disertasi dari Reza ini memaparkan mengenai permasalahan hingga perubahan dalam ranah masyarakat dan wilayah Kota Malang. Wilayah Malang mengalami perubahan dinamika ketika mendapatkan status *Gemeente* dan menuju ke taraf modernisasi.¹⁸ Reza memaparkan bahwa proyek perubahan dan pembangunan kota tersebut sebagai upaya untuk menaklukkan posisi masyarakat lokal dan menjadikan kota sebagai basis kekuatan pemerintah. Penguasaan kota tersebut memunculkan berbagai reaksi dan perlawanan dari masyarakat lokal di Malang. Disebutkan oleh Reza bahwa perubahan Kota Malang membawa dampak perubahan sosial pada

¹⁸ R. RezaHudiyanto, *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa 1914-1950* (Yogyakarta: Penerbit Lilin, 2011), hlm. 6

berbagai jenis aktivitas Bumiputera yang harus menempati wilayah pinggiran Kota Malang. Karya Reza menjadi rujukan penting dalam penulisan ini dikarenakan kesamaan pada aspek tema dan unsur pembahasan yang terfokus pada masyarakat. Di sisi lain Malang merupakan wilayah yang dekat dengan Blitar dengan kondisi geografis dan iklim yang hampir sama.

Kedua, tinjauan tentang tema sejarah sosial, penulis mengacu buku karya Abdurrachman Surjomihardjo, berjudul *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Pembahasan dalam buku yang tergolong dalam kajian sejarah lokal ini membangkitkan kembali kenangan tentang Kota Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukan masyarakatnya. Buku sejarah sosial tersebut banyak menguraikan akar-akar pembentukan kota sejak tahun 1756, kehidupan masyarakat dan proses penyesuaian kelompok-kelompok penduduk kerajaan dan orang-orang kolonial Belanda yang telah mencengkeram kota tersebut sejak abad ke-19 sampai ke-20.¹⁹ Komunikasi yang berjalan antara orang Eropa dan pribumi terutama karena faktor organisasi sosial dan politik menghubungkan mereka dalam satu kehidupan yang berdampingan. Hingga terjadi perbenturan budaya antara kekuatan tradisional dan kolonial yang membawa ke tahap modernisasi kota.

Ketiga, karya Jean Gelman Taylor berjudul *Kehidupan Sosial di Batavia*. Buku ini memaparkan interaksi hubungan antara orang Asia dan Eropa di Batavia terutama pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Hubungan keluarga digunakan Jean

¹⁹Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*(Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 13-14

untuk menarasikan kajian tentang masyarakat kolonial Belanda, dimana sejak masa VOC di Batavia kehadiran orang-orang Belanda memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada tatanan kehidupan sosial di Batavia. Orang-orang Eropa ketika berada di Batavia memiliki jalur dan cara tersendiri dalam membangun suatu hubungan antar kelompoknya guna mengontrol posisi kekuasaan dan kekayaan dalam masa kehadiran mereka di Batavia. Kajian ini juga menunjukkan adanya perkembangan hubungan keluarga Indies yang mana mereka merupakan keturunan dari perempuan-perempuan lokal campuran Eropa-Asia dan keturunan Eropa. Tak lupa Jean juga memaparkan peran-peran perempuan kelahiran Eropa di pemukiman Belanda-Asia. Narasi kehidupan sosial masyarakat di Batavia ini dijabarkan pula pada aspek sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai bagian dari bangsa Asia. Kehadiran bangsa Eropa dalam perkembangannya menyebar menjadi beberapa bagian keturunan, hal ini telah menimbulkan pengaruh tersendiri pada tatanan sosial di Batavia. Salah satunya dengan terserapnya kebudayaan kolonial Belanda dan semakin menyebar pengaruhnya ketika kekuasaan Belanda meluas pada abad ke-19.

Keempat, tinjauan terhadap spasial, penulis mengacu karya Hery Setiabudi dalam judul *Blitar Tempoe Doeloe*. Buku ini merupakan karya sejarawan Blitar dengan fokus pembahasan terkait wilayah Blitar sejak masa kerajaan kuno hingga zaman kolonial. Hery Setiabudi menggunakan pendekatan hukum dan pranata pemerintahan daerah untuk menjelaskan sejarah Blitar dan masyarakatnya dari masa ke masa. Dimasa kerajaan, Blitar berubah mengikuti gelombang besar peradaban baru dan memunculkan wilayah Syarengat atau Sarengat dengan sistem

tatanan masyarakat yang bersifat tradisional. Wilayah dan kelompok masyarakat ini kurang mendapat perhatian hingga pada akhirnya kolonialisme membumi di Blitar.²⁰ Berbagai pranata kekuasaan bangsa kolonial di ranah hukum kemudian mempengaruhi segala jenis perubahan baik dalam hal pemerintah daerah maupun identitas yang ada di tatanan masyarakat Blitar. Pemilihan karya ini dianggap penting untuk dijadikan rujukan mengingat kedekatan spasial yang digunakan Hery dalam karyanya, memberikan gambaran baru dan membantu penulis untuk menguraikan dan memaparkan aspek perubahan yang terjadi pada hubungan masyarakat dan orang-orang Eropa di Blitar.

Kelima, karya Den B.I Maerdiono berjudul *Napak Tilas Jejak-Jejak Kaki Wong Blitar Dari Masa ke Masa*. Buku ini merupakan hasil penelusuran dan pengumpulan sejarah tentang Blitar yang dilakukan oleh Maerdiono sehingga masih banyak terdapat celah-celah kosong yang harus diisi dari hasil penelitiannya. Namun, buku ini membantu penulis dalam menguraikan sejarah Blitar dalam perkembangannya yang ditulis sejak masa kerajaan hingga masa Indonesia Baru. Maerdiono banyak membahas terkait pemerintahan Blitar dari masa ke masa, kondisi masyarakat, pembangunan di Blitar, hingga perubahan Blitar dari kekuasaan tradisional menuju kekuasaan modern.²¹ Dipaparkan pula kondisi Blitar yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dan peran masyarakat Blitar dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia. Dalam karyanya ini, penulis lebih memfokuskan pada narasi tentang sejarah pembentukan wilayah secara umum,

²⁰ Hery Setiabudi, *op.cit*, hlm. 99

²¹ Den B.I Maerdiono, *op.cit*, hlm. 5-6

pemerintah Kabupaten dan Kota Blitar, dan peringatan hari jadi daerah. Bagi penulis, analisis yang ditawarkan dalam buku ini menjadi cukup penting untuk melihat karakteristik masyarakat Blitar dan perkembangannya terutama ketika bangsa kolonial menguasai daerah Blitar.

Keenam, tinjauan atas temporal, penulis mengacu tesis Nurhadi Sasmita, *Industrialisasi di gemeente Blitar tahun 1900-1942*. Terbitan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Karya ini merupakan tesis yang juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Kedekatan dengan temporal pada penelitian ini menjadi alasan penulis untuk menggunakan rujukan dalam tesis tersebut yang membahas mengenai dinamika perkembangan industrialisasi di Blitar meningkat secara signifikan sejak penetapan kawasan kotapraja. Nurhadi menjelaskan bahwa industrialisasi di Blitar dikembangkan oleh pemerintah kolonial dan pihak swasta, yang memperkerjakan para penduduk lokal.

Dinamika industri di Blitar cukup menarik karena mengangkat pula keberadaan penduduk bumiputera yang memiliki andil dalam pengembangan sektor industri rumahannya. Dalam penelitiannya disebutkan beberapa industri yang berkembang di Blitar antara lain industri manufaktur (pengolahan), industri jasa telekomunikasi (pos, telegraf, dan telepon), industri perumahan, perkantoran dan utility (pasar, rumah sakit, listrik, air minum). Penulis pun juga mendeskripsikan para tenaga kerja dan kondisi sekitar industri yang kemudian berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Blitar. Menurut penulis keberadaan industri tersebut membawa dampak besar terhadap perubahan wilayah dan masyarakatnya yang lebih modern.

Ketujuh, jurnal berjudul “*Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925*” karya Taufik dan Huddy Husin yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI. Pemaparan pada jurnal ini ditekankan pada aspek sejarah sosial di wilayah Cirebon ketika kolonial berkuasa, munculnya kekuatan-kekuatan sosial di akhir abad ke-19. Perubahan sosial politik yang ada di Cirebon pun mengubah daerah ini menjadi tiga kekuatan besar yaitu, Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman yang ketiganya berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.

Pengaruh dari faktor eksternal Cirebon membawa konsekuensi tersendiri pada kehidupan internal masyarakatnya yang mengalami proses integrasi di berbagai bidang kehidupan. Perubahan yang dipaparkan penulis disertai oleh faktor pemicu seperti, bentuk fisik kota yang lebih modern, sistem perekonomian yang telah masuk dalam mata rantai perdagangan internasional, dan intelegensi yang tumbuh di kalangan terdidik dan bangsawan di Cirebon. Aspek interaksi sosial yang ditunjukkan oleh penulis melalui hubungan Bumiputera dan kalangan Tionghoa dijelaskan memiliki peranan yang cukup besar di wilayah Cirebon terutama dalam hal keberlangsungan ekonomi. Secara keseluruhan dalam jurnal ini memaparkan gambaran aspek sosial di masyarakat yang sekaligus dapat menjadi rujukan tambahan mengenai kondisi kehidupan sosial terutama yang terjadi di Jawa selama abad ke-19 hingga abad ke-20.

Kedelapan, karya skripsi berikutnya berjudul “*Perkebunan Kopi di Blitar Tahun 1874-1942*” yang ditulis oleh Agung Setiawan mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. Karya tersebut membahas perkebunan di wilayah Blitar dan

pembahasan tentang pemerintah kolonial yang memanfaatkan perkebunan sebagai penghasilan utama di wilayah Blitar terutama pada abad ke 19 hingga abad ke-20. Dengan didukung oleh wilayah yang subur, Blitar dikatakan sebagai salah satu tujuan kolonial dalam mengeksplorasi sumber daya alamnya. Pada skripsi tersebut terdapat pembahasan mengenai perubahan ekonomi dan peran-peran sosial di kalangan masyarakat bumiputera dengan keberadaan perkebunan ini.²² Selain itu, disinggung pula keberadaan para pekerja-pekerja perkebunan yang banyak mendiami kawasan Blitar bagian utara serta pemilik lahan-lahan perkebunan di Blitar.

1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian mengenai kehidupan sosial masyarakat di Blitar pada periode 1906-1942 ini menjelaskan mengenai berbagai aspek yang muncul di ruang sosial masyarakat Blitar. Penelitian ini tergolong dalam kajian sejarah sosial sehingga penulis menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai pelengkap pendekatan historis serta memperdalam analisis terhadap suatu permasalahan dalam peristiwa sejarah.²³ Kehadiran sejarah sosial mulai terlihat ketika paradigma tentang sejarah politik terutama pembahasan sejarah elit atau penguasa lebih menonjol. Sejarah sosial lebih menitik beratkan pada golongan non-elit, yang artinya titik tumpu historiografi ditentukan dan dimulai dari kalangan masyarakat umum.

²²Agung Setiawan, *Skripsi*, “Perkebunan Kopi di Blitar Tahun 1874-1942” (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm 4

²³Trijono, “*Kota Jember: Dari Kota Kolonial Hingga Kota Republik 1929-1992*” (Denpasar, Universitas Udayana, 1997), *Skripsi*, dalam Muhammad Badrul Huda, *op.cit*, hlm.12

Menurut Kuntowijoyo, penulisan sejarah sosial memerlukan usaha dalam rangka menyusun kerangka utuh tentang konsep kemasyarakatan secara keseluruhan sehingga memerlukan strategi khusus guna mendapatkan inspirasi heuristik ketika pencarian, pengumpulan dan penyusunan.²⁴ Sejarah sosial juga memiliki bahan garapan yang luas dan beranekaragam. Seringkali berkaitan erat dengan sejarah ekonomi. Berbagai tema dapat ditelaah seperti pergerakan sosial, institusi sosial, fakta-fakta sosial berupa jumlah penduduk hingga urbanisasi.²⁵ Pada perkembangannya sejarah sosial lebih dipusatkan pada problem-problem sosial yang lebih sempit seperti kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemerosotan. Penelitian ini tentunya membagi kerangka konsep dalam beberapa bagian utama yaitu, pendefinisian tentang interaksi sosial dan stratifikasi sosial, serta konsep masyarakat sebagai objek utama pada penelitian.

Penelitian ini menempatkan masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan sekitar sebagai aspek bahasan utama. Mengutip dari Selo Soemardjan yang mengartikan masyarakat sebagai orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.²⁶ Terdapat istilah masyarakat setempat (*community*) yang merujuk pada warga di suatu desa, kota, suku ataupun bangsa yang hidup bersama, dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama dan bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan interaksi terbesar antara satu sama lain terjadi di

²⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 42

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit*, hlm. 27

lingkup anggotanya.²⁷ Masyarakat menurut Soerjono Soekanto terbagi dalam beberapa pengelompokan sehingga muncul istilah masyarakat pedesaan (*rural community*) yang memiliki hubungan lebih erat dengan lingkup sosialnya dan ada masyarakat perkotaan (*urban community*) yang lebih modern dan tidak tertentu jumlah penduduknya.²⁸

Masyarakat senantiasa melakukan hubungan antar individu atau kelompok. Proses hubungan tersebut terwujud dalam sebuah interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara berhubungan yang dapat dilihat apabila individu dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem hubungan sosial.²⁹ Dalam proses interaksi inilah akan memunculkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi, yang menurut Edwin H Sutherland, interaksi harus melibatkan sikap, nilai dan harapan dari masing-masing individu ketika melakukan kegiatan.

Dalam ruang sosial masyarakat yang saling melakukan hubungan timbal balik dan adanya perbedaan latar belakang, akan mewujudkan adanya stratifikasi yang berkembang dengan sendirinya. Hanya pada masyarakat dengan struktur sangat kecil dan homogen yang cenderung tidak memiliki lapisan sosial atau stratifikasi.³⁰ Setiap masyarakat di manapun pasti selalu mempunyai sesuatu yang dihargai bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status, atau keturunan dan segala

²⁷ Selo Soemardjan, *op.cit*, hlm. XX

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 167-168

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 78

³⁰ Astrid S. Susanto, *op.cit*, hlm. 65

hal yang bernilai ekonomis. Hal tersebut yang kemudian menentukan status dan stratifikasi setiap individu atau kelompok di masyarakat. Di setiap wilayah dan periode zaman sesuatu yang dihargai oleh masyarakat secara luas tidak selalu sama.

Pitirin A. Sorokin menyatakan bahwa stratifikasi sosial (*social stratification*) adalah pembedaan penduduk kedalam suatu kelas-kelas tertentu secara bertingkat atau hierarkis, yang terwujud dengan adanya kelas tinggi dan kelas rendah hingga memunculkan dimensi kekuasaan seperti *privilese* dan *prestise*.³¹ Dasar dan inti dari lapisan di dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban, adanya tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengarahannya di antara anggota masyarakat.³² Penulisan sejarah sosial dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi tentunya sangat penting bagi perkembangan historiografi Indonesia. baik penelitian tersebut dilakukan di lingkungan kota, desa maupun unit-unit masyarakat terkecil.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian historis yang mengungkapkan hal-hal yang terjadi di masa lampau disertai fakta dan sumber. Catatan historis terkait *Gemeente* Blitar dan dinamika sosial masyarakatnya dianalisis berdasarkan sumber primer dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Suatu penelitian sejarah pun menggunakan metode untuk menguji secara kritis dari data yang telah didapat dan diolah kedalam satu narasi analitis-deskriptif.³³ Adapun tahapan metode penulisan

³¹ Pitirin A. Sorokin, *Social Stratification*, (New York: Harper, 1998), hlm. 36

³² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 220

³³ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Arruz Media, 2007), hlm.

sejarah dibagi oleh Kuntowijoyo dalam beberapa tahap, yakni: pengumpulan sumber, verifikasi sumber (kritik sumber), interpretasi (analisa dan sintesis) dan terakhir ialah historiografi (penulisan sejarah).³⁴

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan, pada tahap awal menentukan pemilihan topik yang sewajarnya dipilih berdasarkan kedekatan emosional, kedekatan intelektual dan rencana penelitian.³⁵ Kedekatan emosional yang dipilih penulis berusaha untuk meneliti dan mendeskripsikan pembahasan terkait hubungan sosial di masyarakat yang terjadi pada tahun 1906-1942. Mengingat penulis ingin meneliti wilayah tempat tinggalnya sebagai kota kecil untuk menjadi narasi sejarah lokal.

Tahap metode pertama yaitu, heuristic (pengumpulan sumber) penulis mengumpulkan data berupa arsip sebagai sumber primer, sekaligus data lain sebagai sumber sekunder. Kedua data tersebut diperoleh penulis dari Arsip Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia, dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota/Kabupaten Blitar. Penulis mendapatkan berbagai arsip, seperti *Staatsblaad van Nederlands Indie* tahun 1906 nomor 150 dan nomor 177, memuat landasan hukum penetapan status *Gemeente* di Blitar dan implementasi dari penyelenggaraan urusan desentralisasi serta alokasi anggaran dana di Blitar. Arsip lain merupakan data tentang *Bezoldigingsverdening Stadsgemeente*, yang isinya memuat peraturan-peraturan untuk masyarakat Blitar dan pengaturan kebijakan hingga pembangunan, sehingga dapat pula menjadi sumber guna penjabaran

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

³⁵ *Ibid.*

kondisi masyarakat dan daerah Blitar selama era *Gemeente*. Penulis pun juga mendapatkan *officieel nieuwsblad der Provinciaal Blad van Oost-Java* tahun 1910 sampai 1941, yang berisi deskripsi berita tentang keputusan tata cara dewan kota di Blitar. Serta dari sumber primer didapatkan pula foto-foto yang menggambarkan kondisi di Blitar di masa *Gemeente*.

Penulis melakukan pencarian lebih lanjut dan mendapatkan banyak sumber sekunder, berupa buku-buku resmi yang diterbitkan Bappeda Kabupaten/Kota Blitar dan Blitar Heritage Society, yang membahas sejarah pertumbuhan Blitar secara umum. Penulis mendapatkan berbagai sumber sekunder dari Perpustakaan Kabupaten/Kota Blitar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga, Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan beberapa didapatkan melalui hasil pinjaman koleksi beberapa tokoh-tokoh sejarawan di Blitar. Buku-buku tersebut diantaranya: Napak Tilas Jejak-Jejak Kaki Wong Blitar, Jejak-Jejak Penyebaran Islam di Kota Blitar, Bunga Rampai Hari Jadi Kabupaten Blitar, Blitar Tempoe Doeloe, dan Kumpulan Cerita Sejarah Kelurahan Kota Blitar dan buku pendukung lainnya. Guna mengembangkan kerangka dan perspektif penelitian, penulis pun juga menggunakan beberapa karya skripsi dan jurnal ilmiah yang memiliki topik bahasan sejarah sosial dari berbagai sumber yang diakses melalui website yang kredibel.

Tahap kedua, penulis melakukan verifikasi sumber dengan cara kritik atas arsip dan sumber-sumber data yang telah diperoleh. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara sumber data satu dengan lainnya yang independen

untuk menemukan validitas setiap data. Tahap ini dilakukan dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern untuk menentukan otentitas atau keaslian sumber sejarah dengan melihat fisik dari sumber. Kritik intern dilakukan dengan cara penilaian intrinsik terhadap sumber tersebut.

Setelah menemukan data sumber yang sesuai dengan kerangka penelitian, maka pada tahap selanjutnya dilakukan interpretasi penulisan sejarah. Hal ini dilakukan dengan cara analisa dan menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Setelah ketiga tahapan dilalui, maka tahap terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi, yang dibagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab. Tahap ini merupakan inti untuk merangkai data-data yang diperoleh menjadi narasi sejarah yang kronologis dan imajinatif.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis telah membagi bab inti dan sub bab yang akan menjadi pembahasan utama pada penelitian Dinamika Sosial Masyarakat Blitar pada kurun waktu 1906-1942. Berikut pembagian pada tahapan penulisan:

Bab I, berisi pendahuluan yang membahas latar belakang penulisan penelitian ini, terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pembahasan sejarah dan kondisi sosial politik Blitar pada awal abad ke-20 serta faktor ditetapkannya menjadi *gemeente*. Dibahas pula kondisi geografis, demografi dan administrasi pemerintahan di Blitar selama tahun 1906

sampai 1942. Pada pembahasan ini akan dipaparkan pula terbentuknya institusi di ranah pemerintahan pasca ditetapkan menjadi *gemeente*.

Bab III, merupakan pembahasan dan pendalaman temporal spasial penelitian, yang akan memaparkan hubungan sosial yang terjalin antar penduduk di Blitar yang berasal dari berbagai latar belakang. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab diantaranya: Sub-bab pertama, penggolongan stratifikasi sosial masyarakat di Blitar. Pada pembahasan ini dipaparkan tingkatan stratifikasi di masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan. Terdiri dari tiga sub bab, pertama penggolongan stratifikasi di masyarakat Eropa, kedua penggolongan di kalangan orang Tionghoa, dan ketiga di kelompok masyarakat Bumiputera. Di bab ini juga akan dijabarkan berbagai macam jenis pekerjaan (ekonomi), jabatan dan tingkatan status keluarga pada masyarakat Blitar.

Sub-bab kedua, memaparkan proses interaksi masyarakat Blitar yang tumbuh di berbagai sistem kehidupan sosial di antara tahun 1906-1942. Termasuk faktor-faktor tumbuhnya interaksi pada masyarakat Blitar terutama kelompok Bumiputera. Terdapat beberapa sub bab yang membahas interaksi antara Bumiputera dengan Eropa, Tionghoa, interaksi yang terjadi di lingkup pendidikan, termasuk interaksi di kalangan pelayan. Sub-bab ketiga, hasil dari interaksi yang memaparkan beberapa infrastruktur yang dibangun untuk menunjang interaksi. Dalam sub bab ini dibahas pula beberapa organisasi yang terbentuk di masyarakat Blitar.

Bab IV, dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari hasil penulisan tentang dinamika sosial masyarakat Blitar tahun 1906-1942.

Simpulan di bab ini merupakan pembacaan dan analisis dari pembahasan yang telah diuraikan sekaligus sebagai penutup tulisan